

Prabowo-Sandi Mau Adopsi

Program Swasembada Era Soeharto, Bisakah?

Trio Hamdani - detikFinance

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4307246/prabowo-sandi-mau-adopsi-program-swasembada-era-soeharto-bisakah>

Minggu, 18 Nov 2018 17:23 WIB



Foto: Prabowo hadir Haul Mbah Priuk. (Isal Mawardi/detikcom)

Jakarta - Titiek Soeharto mengungkit zaman Orde Baru (Orba) yang pernah swasembada pangan. Dia menjanjikan, jika Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden, pencapaian dan keberhasilan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto akan kembali tercapai.

Lantas, bisakah kebijakan di era Orde Baru itu diterapkan saat ini?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, dibalik sisi negatif Orde Baru, ada kebijakan-kebijakan positif yang bisa diterapkan di zaman sekarang, termasuk swasembada pangan. Tentunya, itu disesuaikan dengan kondisi saat ini.

Baca juga: [Disinggung Titiek Soeharto, Seperti Apa Swasembada Era Orde Baru?](#)

"Jadi di luar banyaknya keburukan Orde Baru sehingga ditumbangkan pada 1997-1998, sebenarnya banyak yang positif kebijakannya. Sekarang gimana itu direplikasi ulang dengan era digital dan milenial sekarang. Jadi justru harusnya lebih memudahkan diterapkan," katanya kepada **detikFinance**, Minggu (18/11/2018).

Jadi pertanyaannya bukan bisa atau tidak itu diterapkan melainkan mau atau tidak. Menurut dia keberhasilan yang dulu pernah tercapai tentu bisa diterapkan saat ini.

"Itu dikatakan bisa apa nggak bisa, lho orang ini pernah berhasil dan pernah dilakukan, kok nggak bisa, pasti bisa. Kecuali sesuatu yang nggak pernah dilakukan, itu pertanyaannya ini bisa apa nggak. Kalau sekarang mau dilakukan tinggal mau apa nggak," jelasnya.

Dia juga mengatakan, negara lain pun ada yang mengadopsi kebijakan di era Orba.

Baca juga: [Sandi akan Adopsi Kebijakan Swasembada Pangan Rezim Orde Baru](#)

"Bukan masalah relevan. Negara negara lain yang sekarang melampaui ekonomi Indonesia, seperti Vietnam, Thailand itu kebijakannya mengadopsi kebijakan Indonesia," tambahnya.
(zlf/zlf)